

Tebing Breksi Optimis Pariwisata Pulih

SLEMAN (KR) - Pengelola Tebing Breksi optimis kondisi pariwisata akan bangkit dan pulih kembali usai berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY. Hal itu diungkapkan Kholik Widiyanto, Ketua Pengelola Tebing Breksi saat ditemui *KR* di sela pelaksanaan Vaksinasi Merdeka untuk pelaku pariwisata di area Tebing Breksi, Dusun Nglengkong, Sambirejo, Prambanan, Sleman, Sabtu (21/8). Kebangkitan tersebut, diakui Kholik, harus disertai perjuangan dan kembali babat alas. "Harus mulai dari awal untuk bisa mendongkrak jumlah kunjungan ke angka normal," terang Kholik. Karena itulah sejumlah persiapan untuk buka kembali, terus dilengkapi salah satunya pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk para petugas dan pengelola Tebing Breksi. Selain vaksinasi, Tebing Breksi juga menyiapkan tim yang akan menggencarkan *story telling* sebagai media pengetahuan para pengunjung. "*Story telling* ini bermaterikan kearifan lokal, sejarah

hingga mitos yang dikemas melalui konten digital disertai fotografi dan sinematografi kekinian," sebutnya. Wahyu Nugroho, Lurah Sambirejo menjelaskan, pada vaksinasi kedua uang didukung Bank BPD DIY ini, terdapat pula warga dari luar wilayahnya. Kepada para warga tersebut, Wahyu berharap dapat turut memasarkan dan mempromosikan Tebing Breksi ke pihak luar. Selain berharap PPKM tidak diperpanjang lagi, Wahyu juga ingin ada aturan baru yang sifatnya bisa membantu dan menguntungkan pariwisata. Mengingat 90 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayahnya bersumber dari sektor pariwisata. "Tebing Breksi akan selalu patuh pada semua aturan. Jika objek wisata sudah boleh dibuka kembali, tempat ini juga pasti terapkan semua persyaratan protokol kesehatan, karena semua persyaratan memang sudah dipenuhi termasuk vaksinasi untuk para petugas dan pengelolanya," pungkas Wahyu.

(Sal)-f

PPKM Sambungan hal 1

pengawasan. Bahkan jika ditemukan adanya kerumunan mereka tidak segan-segan untuk membubarkan. "Sejak adanya kelonggaran, secara umum banyak warung dan rumah makan yang sudah mulai buka. Mayoritas dari mereka sebetulnya sudah menerapkan protokol kesehatan, walaupun belum bisa dikatakan maksimal. "Dalam sehari, kami masih menemukan adanya 10 pelanggaran. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama agar ke depan bisa lebih baik," kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Sabtu (21/8). Menurut Noviar, dampak dari adanya kebijakan PPKM meski belum bisa dikatakan maksimal, hasilnya sudah mulai bisa dirasakan. Salah satunya bisa dilihat dari jumlah kasus harian yang mulai menunjukkan adanya penurunan. Kendati demikian, masyarakat tidak boleh cepat merasa berpuas diri dan abai dengan penegakkan

Prokes. Karena selama pandemi belum berakhir penegakkan Prokes harus selalu dilakukan. "Memang, jumlah kasus harian mulai menurun, tapi kita tidak boleh terlena karena penularan kasus masih tergolong tinggi. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat agar selalu menerapkan Prokes," tandas Noviar. Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji juga mengatakan secara umum angka harian kasus konfirmasi positif maupun kesembuhan dari Covid-19 menunjukkan tren positif di DIY. Kasus Covid-19 baru cenderung mengalami penurunan, kali ini bertambah 930 kasus sehingga total 143.825 kasus pada Sabtu (21/8). Kasus sembuh bertambah 2.547. Dengan demikian total kasus kesembuhan di DIY mencapai 120.783 kasus. Kasus meninggal dunia bertambah 29 kasus menjadi 4.536 kasus. (Ria/Ira)-f

99,3 Persen Sambungan hal 1

Tetapi sebelumnya harus dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari proses verifikasi agar usulan tunggakan 2020 dapat disetujui karena sudah diperiksa dan diberikan penilaian oleh BPKP, jadi anggaran sudah boleh dibayarkan. "Karena jumlah nominal yang cukup besar sehingga harus dilakukan secara bertahap dan ini dilakukan delapan kali, dan alhamdulillah ini sudah selesai disetujui oleh Itjen maupun BPKP dengan nilai Rp 1,469 triliun. Ini sudah dibayarkan dengan realisasi 99,3 persen," kata Kirana. Sementara untuk pembayaran insentif nakes 2021, lanjut Kirana, sudah ter-

salurkan dengan teratur dan tepat waktu. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, fasilitas kesehatan harus mengajukan dokumen insentif tenaga kesehatan setiap bulan secara tepat waktu, dimana diatur batas akhir setiap bulannya tanggal 15. "Jadi kami akan membayarkan prioritas kepada fasilitas kesehatan yang tepat waktu. Bila ada yang terlambat kami berikan feed back dan mereka harus melengkapi, memperbaiki dan nanti bisa mengajukan kembali," ucap Kirana. (Ati)-f



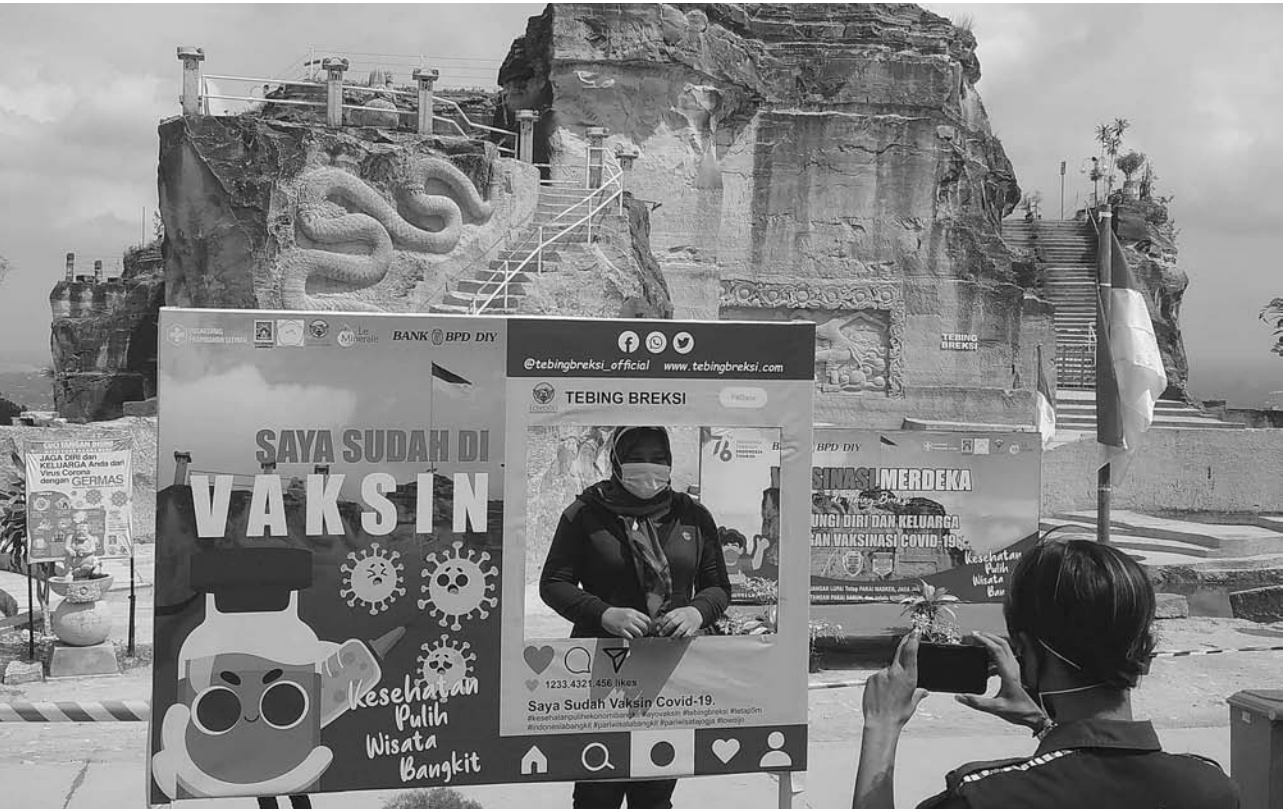
KR-Humas Poli

Kapolri meninjau vaksinasi di kompleks JEC Jakarta, Sabtu (21/8).

Panglima Sambungan hal 1

Membaik atau memburuknya kondisi kesehatan pasien di isolter bisa terpantau petugas," kata Panglima TNI saat bersama Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo MSI dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi Covid-19 massal di Taman Budaya Kulonprogo (TBK) Pengasih, Sabtu (21/8). Panglima TNI menjelaskan, TNI-Polri dan Pemda terus mengimbau masyarakat agar menjalani isolter. Bagi kontak erat yang dinyatakan negatif boleh isoman di rumah lima hari. "Tujuannya agar kasus konfirmasi di Kulonprogo bisa mencapai angka 150 dengan status PPKM Level 3, 2 bahkan 1," tuturnya. Sabtu kemarin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga melepas 34 bus vaksinasi keliling dari Gedung JCC Jakarta Pusat. Selain melepas bus vaksinasi keliling, Kapolri juga meninjau vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Kadin bersama TNI-Polri di Gedung JCC. Menurut Kapolri, keberadaan bus vaksinasi keliling tersebut sebagai wujud percepatan atau akselerasi agar segera tercipta *herd immunity* terhadap Covid-19 atau virus Korona. Bus vaksinasi keliling ini hasil

kolaborasi antara TNI-Polri bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). "Nantinya, bus tersebut akan menyasar warga secara langsung, terutama di lokasi permukiman tak terjangkau. Ini bentuk layanan terhadap kegiatan vaksinasi secara *mobile* dan menyentuh masyarakat," jelasnya. Dengan adanya bus vaksinasi keliling tersebut, Kapolri berharap target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mewujudkan kekebalan kelompok terhadap virus Korona dapat segera tercipta. Dengan melibatkan seluruh pihak, herd immunity bisa lebih cepat tercapai," tandasnya. Dalam kunjungan di Kulonprogo, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, *tracing* dan *testing* harus dilakukan sejak awal untuk mendapat perawatan terbaik, sehingga menghindari kasus kematian. Jika penelusuran dan pengetesan tidak dilakukan sejak dini, pihaknya khawatir banyaknya kasus kematian beberapa waktu lalu di DIY akan terulang lagi, karena terlambat penanganan. "Jangan takut di-*tracing* dan *testing* karena tujuannya untuk penanganan cepat kasus Covid-19. Sebaiknya jujur kemudian isolter, Insya Allah segera sembuh," katanya. (Rul)-f



KR-Surya Adi Lesmana

Pelaku pariwisata berfoto usai vaksinasi dosis kedua di Tebing Breksi, Prambanan, Sleman.

DEMI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
Masa Kerja LOD DIY Perlu Diperpanjang



KR-Haryadi

R Chaniago Iseda SH.

YOGYA (KR) - Menceramati kinerja Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY setahun terakhir ini, bisa dikatakan sudah cukup memenuhi harapan masyarakat, terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan terhadap publik. LOD DIY yang dipimpin Dr Suryawan Rahardjo SH LLM gencar melakukan 'jemput bola' agar bisa bersinergi dengan pemerintahan dalam melaku-

kukan upaya persuasif dan preventif terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesia Monitoring Procedure of Law (Implaw) Yogyakarta R Chaniago Iseda SH, Jumat (20/8). Chaniago Iseda menyampaikan agar LOD DIY bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya, kiranya perlu dipikirkan masalah efektivitas waktu masa kerja. Selama ini pengelolaan LOD DIY berlaku selama 3 tahun, dan itu dianggap masih kurang untuk mengoptimalkan kinerja. Agar LOD DIY bisa bekerja sesuai harapan masyarakat, efektif dan efisien dalam penanganan perkara kebijakan dan pelayanan publik perlu kiranya dilakukan perpanjangan masa tugas LOD DIY.

"Ini baru sebatas usulan, semoga pihak-pihak yang berkompeten bersedia mempertimbangkan demi kepentingan masyarakat. Idealnya masa tugas LOD DIY 5 tahun," ujar Chaniago Iseda. Ditambahkan, LOD DIY telah menjalankan fungsinya dengan mengedepankan komunikasi antara SKPD terkait di seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintahan Provinsi (Pemprov). Setidaknya hal itu telah dibuktikan LOD DIY selama pandemi Covid-19 dengan melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah, untuk melindungi masyarakat dari serangan virus korona. Selain itu, LOD DIY juga mengawasi proses penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga

lain. Chaniago Iseda menyampaikan LOD DIY wajib memperhatikan kinerja semua lembaga selama pandemi Covid-19, untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik secara administrasi maupun di lapangan. LOD DIY saat ini terus mengupayakan agar eksekutif dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan fungsinya, tentu harus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara baik. Hal itu sesuai dengan pembentukan SKPD pada pasal 120 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. "Menge-nai usulan perpanjangan masa kerja LOD DIY tidak lepas dari pertimbangan efisiensi anggaran proses penyeleksi-an anggota Komisiner LOD DIY," ujar Chaniago Iseda. (Hrd)

Evakuasi Sambungan hal 1

Pesawat TNI Angkatan Udara berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma pada 18 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB. Rute yang ditempuh pesawat untuk mencapai Kabul, Afghanistan, yaitu melalui Aceh, Kolombo (Sri Lanka), Karachi (Pakistan), dan Islamabad (Pakistan) hingga tiba di Kabul pada 20 Agustus 2021, pukul 05.17 dini hari waktu setempat. Untuk menjamin kelancaran proses ini, Indonesia dengan intensif

berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Norwegia, pihak Belanda, Amerika Serikat, dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). "Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang diberikan oleh Pemerintah dan otoritas India, Sri Lanka, Pakistan, Amerika Serikat, NATO, Turki, Norwegia, dan Belanda," tutur Retno. Hingga saat ini, Indonesia masih

berperan dengan aktif dalam menjalin komunikasi bersama berbagai pihak yang berada di Afghanistan guna memantau kondisi terkini negara tersebut. Menlu berharap proses politik yang inklusif, dalam hal ini Afghanistan-led, Afghan-owned masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afghanistan. "Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan," ucapnya. (Ant/Rul)-f

Pertumbuhan Sambungan hal 1

keterpurukan yang diakibatkan pandemi Covid-19," ungkap Robi dalam pembukaan vaksinasi di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta, Sabtu (21/8). Selain Rektor UPN Veteran Yogyakarta Mohammad Irhas Effendi, pembukaan dihadiri Direktur Utama Bank BPD DIY Santosa Rohmad (Dirut) dan Dian Ariani (Direktur Kepatuhan). Juga hadir Wawan Hermawan (Waketum Kadin DIY Bidang Perbankan, Lembaga Keuangan dan Keuangan Syariah) serta Tim Apriyanto (Kordinatorator Tim Pelaksana Vaksinasi Kadin DIY). Dirut Bank BPD DIY, Santosa Rohmad mengungkapkan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini dibutuhkan kolaborasi dan sinergi di semua lini. "Jadi, tidak hanya bicara soal sektor ekonomi, tapi bagaimana mempersiapkan generasi bangsa di masa mendatang. Dengan demikian mahasiswa dan pelajar bisa men-

apatkan layanan pendidikan sesuai keharusan," tandasnya. Untuk itu, lanjut Santoso Rohmad, Bank BPD DIY mensupport penuh Kadin DIY dan UPN dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi mahasiswa, karena memiliki dampak cukup luas. "Kalau mahasiswa bisa kembali tatap muka dan mendapatkan ilmu secara maksimal, aktivitas ekonomi bisa segera bangkit. Begitu pula dengan destinasi wisata yang sempat terpuruk akibat pandemi dapat pulih. Untuk itu Bank BPD DIY berkomitmen mendukung percepatan vaksinasi di DIY," tegasnya. Mohammad Irhas Effendi menyatakan, vaksinasi ini memang untuk mahasiswa, dengan inisiasi dari Kadin dan Bank BPD DIY. Program ini diadakan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi, dan bagi perguruan tinggi sangat strategis. "Hal itu mengingat perguruan tinggi harus menyiapkan diri

menghadapi rencana perkuliahan tatap muka maupun *blended learning*, sehingga semua civitas akademika harus divaksin," ungkapnya. Wawan Hermawan menambahkan, Kadin DIY mempunyai komitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dimana salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut lewat percepatan vaksinasi. Jika jumlah vaksinasi sudah mencapai 70 persen dari masyarakat di DIY dan didukung dengan perilaku masyarakat yang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (5M) maka diharapkan perekonomian DIY menuju ke arah pemulihan ekonomi. Komptap Kadin DIY Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Y Sri Susilo mengatakan, Kadin DIY akan menggandeng semua pemangku kepentingan agar target vaksinasi 20.000 per hari di DIY dapat dicapai. (Ria)-f



KR-Dokumentasi Basarnas Yogyakarta

KECELAKAAN TRUK: Tim SAR Gabungan mengevakuasi sopir truk yang terjepit kecelakaan di Ringroad Selatan sebelah selatan Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (21/8). Truk bermuatan sambal menabrak truk yang sedang berputar arah. Pengemudi bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Gamping.